

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Aartje Tehupeiory. 2017. *Makna konsinyasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum*. Indonesia: Raih Asa Sukses.
- Aartje Tehupeiory, 2020. *Hormat Hukum Yang Melindungi Kepentingan Pemegang Hak Atas Tanah (Konsinyasi Pengadaan Tanah)*. Cetakan I Jakarta UKI Press
- Agus Jatmiko, 2022. *A Sampai Z Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Permasalahan Dan Solusinya*. Yogyakarta : Deepublish.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2019 . *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233- 1456BW*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amiruddin & Asikin Z. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Andrian Sutedi, 2013. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arba, 2021. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Sinar Grafika ( Bumi Perkasa ).
- Bernhard Limbong, 2012. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, terbitan Jakarta Pustaka Margaretha.
- Bambang Waluyo, 2012. *Metode Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.
- B . F Sihombing, 2018. *Sejarah Hukum Tanah Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group, Divisi Kencana.
- Djoni Sumardi Gozali, 2019. *Hukum Pengadaan Tanah di Indonesia Pengaturan Serta Prosedur Dan Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Citra Aditya Bakti
- Ginting, D, 2013. *Kapita Selektu Hukum Agraria*. Jakarta: Fokusindo Mandiri.

- Gunanegara, 2016. *Rakyat dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan: Pelajaran Filsafat, Teori Ilmu dan Jurisprudensi*. Tatanusa.
- Istiqamah, 2012 *Hukum Perdata di Indonesia*. Makassar: Alauddin University Press.
- Jayadi Setiabudi, 2012. *Tata Cara Mengurus Tanah, Rumah, Serta Segala Perizinanya*, cetakan.1. Yogyakarta: buku pintar.
- Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan empiris*. Depok : Prenadamedia Group.
- Muhammad Syaifuddin, 2012. *Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik & Praktik Hukum*, Cetakan. I; Bandung: CV.Mandar Maju.
- Muliawan, Jarot Widya. 2016. *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Melalui Konsep 3 in 1 in the Land Acquisition*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Nandang Isnandar, Hadi Arnowo. 2021. *Prinsip Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia*. Jawa Tengah: SIP Publishing
- Oloan Sitorus, 2014. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional. Jakarta: Djambatan.
- Sudjito, Sarjita , 2012. *Restorasi Kebijakan Pengadaan Tanah, Perolehan, Pelepasan Dan Pendayagunaan Tanah, Serta Kepastian Hukum Di Bidang Investasi*.Yogyakarta: TUGUJOGJA Pustaka.
- Sugianto, Leliya. 2017. *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Sebuah Analisis dalam Prespektif Hukum & Dampak Terhadap Prilaku Ekonomi Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. bandung : Alfabeta.

- Suyanto, 2021. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Atas Tanah*.  
Surabaya : SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.
- Umar Said Sugihartono, 2015. *Hukum Pengadaan Tanah*, Malang: Setara Press
- Urip Santoso, 2013. *Hukum Agraria*, Jakarta: Kencana, 2013
- Wawan Muhwan Hariri, 2013. *Hukum Perikatan*, Bandung: CV Pustaka Setia.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,(Kementrian BUMN. Jakarta 2012)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993. Ditetapkan di Jakarta 17 juni 1993
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2005
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2006.(Deputi Sekretariat Kabinet Bidang Hukum)
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tentang. Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2012

### **Jurnal**

- Agus Suntoro, “ *Penilaian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum : Perspektif HAM*” Buhimi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No 1 Mei 2019

- Agung Basuki Prasetya, "Prinsip Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum".  
Administrative Law & Governance Journal Vol. 1 Edisi 3 Agustus 2018
- Amalia, Rizky. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Penetapan Ganti Rugi Terkait dengan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum." Yuridika 27.3 (2012): 267-280.
- Anugrah, Fajrian Noor. "Penetapan Ganti Rugi Hak Atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." Al-Adl: Jurnal Hukum 8.2 (2016).
- Dantes, Komang Febrinayanti, and I. Gusti Ayu Apsari Hadi. "Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng." Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 7.1 (2021): 486-494.
- Kasenda, Dekie G. "Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum." Morality, vol. 2, no. 2, 2015, pp. 122-141.
- Langelo, Rosana Dewi. "Penetapan Lokasi Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pembayaran Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." University Of Bengkulu Law Journal 3.1 (2018): 68-78.
- Lasut, Roy Frike. "Pelaksanaan Bentuk Ganti rugi atas Tanah Menurut UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum." Lex et Societatis 1.4 (2013).
- Lawalata, Stevi Hendi, Jenny Kristiana Matuankotta, and Novyta Uktolseja. "Konsinyasi/penitipan uang sebagai bentuk ganti rugi atas pengalihan hak tanah." PAMALI: Pattimura Magister Law Review 1.1 (2021): 16-29.
- Hery Zarkasih, "Pelaksanaan Prinsip Keadilan dalam Pemberian Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah)", Jurnal IUS, Vol III, No. 8, Agustus 2015, 383

- Imam Koeswahyono, “*Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum*”. Jurnal Konstitusi PPK-FH Universitas Brawijaya. Vol. 1 No. 1, Agustus 2018
- Kornelius Benuf , Muhamad Azar. “ *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”. Jurnal Gema Keadilan. Vol 7 Edisi I, Juni 2020
- Pamuncak, Aristya Windiana.” *Perbandingan Ganti Rugi dan Mekanisme Peralihan Hak Menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012*”Jurnal Law and Justice 2016. Vol. 1 No. 1 Maret 2016
- Putri Lestari. “*Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila*”. SIGn Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2 Maret 2020
- Rahayu Subekti. “ *Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum*” . Vol. 5 No. 2 Mei-Agustus 2016
- Samuel Sagala. “*Penetapan Nilai Ganti Rugi Kerugian Atas Tanah Dalam Hal Pengadaan Tanah Demi Kepentingan Umum* “. Vol 1 Mei 2022
- Suhadi, *Pembangunan Hukum Tanah Nasional Berdasarkan Konsep Negara Hukum Pancasila*. Jurnal Pawiyatan, Vol: XXIII, No: 1 2016.
- Suhadi, dkk. “*Analisis Hukum Terkait Konsultasi publik Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Bagi Kepentingan Umum*”. Pandecta Volume 12, Nomor 1, Juni 2017
- Syarafina, Silvia, and Yuli Indrawati. "*Perkembangan lembaga konsinyasi di Indonesia dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam ganti rugi.*" Indonesian Notary 3.1 (2021).
- Tami Rusli. “*Analisis Pelaksanaan Konsinyasi Ganti Rugi Pada Pengadaan Tanah*”. Keadilan Progresif Volume 9 Nomor 1 Maret 2018

Tengku Erwinsyahbana, “ *Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektifa Filsafat Kontruksi*”. Volume 1, No 1 Juni 2017

### Skripsi

Agus Yafli Tawas, 2013. “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum ( Studi Kasus Pelebaran Jalan Maradinata Dua Di Kota Manado)”

Ayu Laura Tania, 2013. "Tinjauan Yuridis Pemberian Ganti Rugi Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Waduk Logung"

Hamdi, 2014. “Penyelesaian Sengketa Penetapan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Umum ( Kajian Terhadap Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2012 )”

### Artikel

Fahlevandlaw. 2016. ”Politik Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Antara Manifestasi Keadilan Sosial dengan Kepentingan Pemerintah bagi Pembangunan”

Tulisan Hukum/Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Badan Statistik Kabupaten Badung. “ Tata Letak Wilayah Kelurahan Benoa”

### Internet

Berita Badung. 2022. *Lahan Warga Peminge Nusa Dua Terdampak Pelebaran Jalan*. <https://www.beritabadung.id/read/lahan-warga-peminge-nusa-dua-terdampak-pelebaran-jalan> (diakse tanggal 9 Agustus 2022).

I Made Dwi Kardiasa. 2022. *Berujung Pengadilan, Pelebaran Jalan Nusa Dua Efek G20 Tersendat*. <https://bali.genpi.co/hot-news/5740/berujung-pengadilan-pelebaran-jalan-nusa-dua-efek-g20-tersendat> (diakses tanggal 9 Agustus).

Murdacitta, Perarem Desa Adat Peminge NOMOR :06 TAHUN 2022. 2023.

<https://jidhat.baliprov.go.id/storage/perarem/oS1Hngb7CFhnmVzB02qCIIDEMGBSE9bXbr7sW0rZ.pdf>

Triwidiyanti. 2022. *Kronologi Kekecewaan Warga Nusa Dua Eksekusi Lahan Aksas jalan G20*

<https://www.detik.com/bali/berita/d6214686/kronologi-kekecewaan-warga-nusa-dua-eksekusi-lahan-akses-jalan-g20> (diakses tanggal 9 Agustus 2022).

